

**KAPABILITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN LEMBANG BOSANG KECAMATAN BONTOMANAI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Disusun dan diusulkan oleh

PUTRI WULANDARI

Nomor stambuk: 105610485914



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KAPABILITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN LEMBANG BOSANG KECAMATAN BONTOMANAI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PUTRI WULANDARI

Nomor stambuk: 105610485914

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan
Ilmu Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

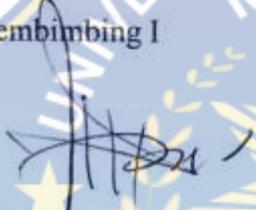
2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang
Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Mahasiswa : Putri Wulandari
Nomor Stambuk : 105610485914
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Muhammadiyah, M.M. **Dr. Muhammad Tahir, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Ketua Jurusan
Fisipol Unismuh Makassar Ilmu Administrasi Negara

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Nasrul Haq, S.Sos., MPA**



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua) 

2. Dr. Muhammad Isa Ansyari, M.Si 

3. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si 

4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos.,M.Si 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Wulandari

Nomor Stambuk : 105610485914

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 06 Agustus 2019

Yang menvatakan



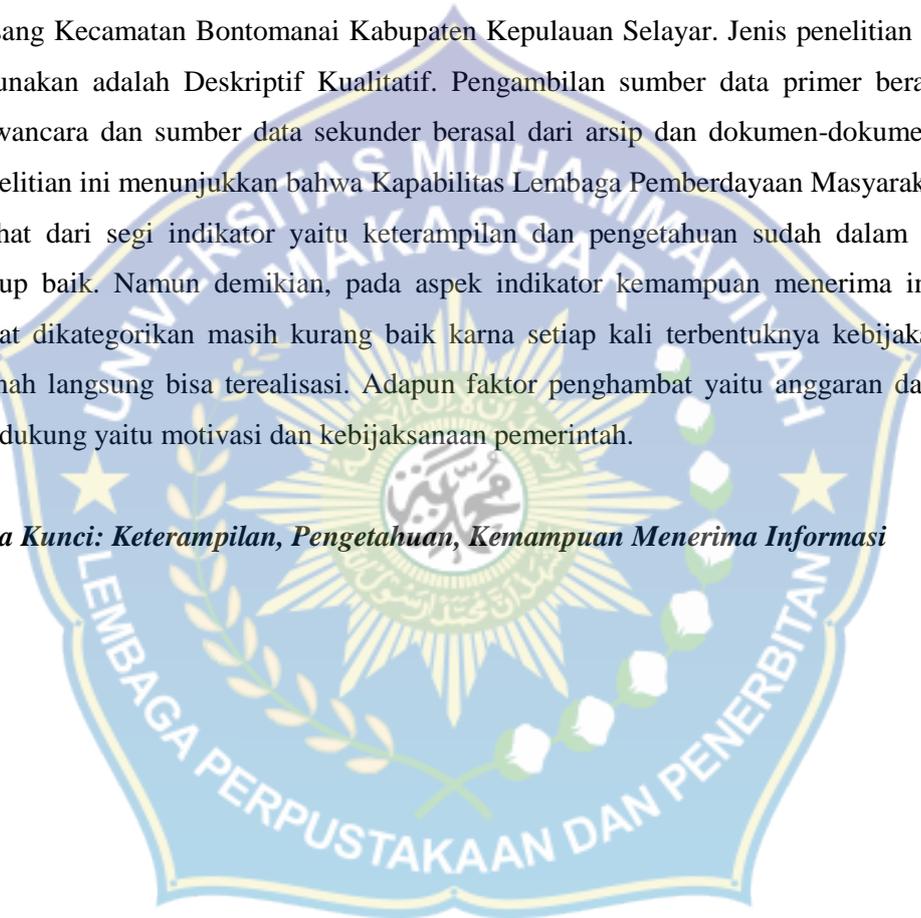
PUTRI WULANDARI

ABSTRAK

Putri Wulandari, “Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar” (dibimbing oleh Muhammadiyah dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapabilitas pemberdayaan masyarakat dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat peningkatan kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Pengambilan sumber data primer berasal dari wawancara dan sumber data sekunder berasal dari arsip dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari segi indikator yaitu keterampilan dan pengetahuan sudah dalam kategori cukup baik. Namun demikian, pada aspek indikator kemampuan menerima informasi dapat dikategorikan masih kurang baik karna setiap kali terbentuknya kebijakan tidak pernah langsung bisa terealisasi. Adapun faktor penghambat yaitu anggaran dan faktor pendukung yaitu motivasi dan kebijaksanaan pemerintah.

Kata Kunci: Keterampilan, Pengetahuan, Kemampuan Menerima Informasi



KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Bapak Dr. H Muhammadiyah, M.M sebagai pembimbing I dan Dr. Muhammad Tahir, MSi sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do'a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Rahman Rahim M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Nasrulhaq, S.Sos., M. PA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. H Muhammadiyah, M.M sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Tahir, MSi selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jajarannya dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Lembang Bosang
8. Kepada Orang Tua Tercinta Baso Daeng, Ibu Siti Syamsiah, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam

penyelesaian studi. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti – hentinya untuk penulis.

9. Untuk kakak – kakak saya Muh Adha Abduh, Nelly Musdalifah S.Pd, Ermayani S.Pd, yang telah membantu saya berupa moral serta moril.

10. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Novi Rismayanti, Muh. Aras, Wahfiuddin Jamil, Umi Kalsum Halim, Eka Nurindah Sari, Andriani, Melinda, Saiful Islam, Ahmad Yani, Jufri, Miftah, Luqman Batari, Amru, Sumsriani, Andi Lulu Khofifah, Fitri Amalia Saleh, Farisah, Aty, Yuni, yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya dan mendampingi saya selama proses penelitian. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk teman-teman 2014 program Studi Ilmu Administrasi Negara terima kasih karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama, terkhusus untuk kelas A.

12. Untuk kawan-kawan organisasi lembaga kemahasiswaan, yakni UKM Bahasa Universitas Muhammadiyah Makassar, Himpunan Mahasiswa Babussalam yang senantiasa ada untuk memberikan doa serta selalu menguatkan atau memberi dukungan disaat penulis terpuruk dan sempat merasa tidak mampu melakukan apa-apa.

13. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan pertama yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara.

Makassar, 06 Agustus 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Kapabilitas	9
B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	15
C. Partisipasi dalam Pembangunan Desa	18
D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	27
E. Pemberdayaan Masyarakat Desa	28
F. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat	30
G. Kerangka Pikir	34
H. Fokus Penelitian	35
I. Deskripsi Fokus Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36

C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
B. Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian	37
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Anggota LPM di Kelurahan Lembang Bosang	77
Tabel 3 Kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	79
Tabel 4 Prasarana dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	34
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana Lembaga Kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

Keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun

wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Menurut Tjokroamidjojo dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) bahwa pembangunan nasional merupakan: 1) Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; 2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya kearah yang lebih baik, lebih maju dan lebih adil; 3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu.

Pada kenyataanya banyak program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pemerintah belum mengoptimalkan peranan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (2010) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul

anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, hal ini ditandai dengan diterapkan maka hal tersebut juga membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa: Guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, agar pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dapat terlaksana perlu diatur pedoman pembentukannya yang tentunya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pembuatan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang mempunyai konsekuensi kepada daerah untuk menggali potensi, terutama fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang sebenarnya merupakan suatu cara untuk pemeratakan hasil pembangunan dengan menonjolkan partisipasi seluruh masyarakat.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah

negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh diwilayah kelurahan. Saran dalam kendala pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan fungsi lembaga pemberdayan masyarakat kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari pemeintah kota dan penambahan dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang

telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar didalam penerapan antar anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Keberhasilan Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Realita dalam masyarakat tepatnya di Kelurahan Lembang Bosang yang dahulunya memaknai kebersamaan dalam bergotong royong kini sudah sulit ditemui. Masyarakat hanya duduk-duduk santai dirumah tidak mau ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Hadirnya lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat bisa menjadi solusi untuk membantu setiap masalah pembangunan di masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selalu mengkoordinasikan setiap masyarakat agar peduli dengan lingkungan serta pelayanan publik selama ini yang dirasar kurang memuaskan.

Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tercermin dalam Standar Kompetensi kelas X dalam materi peran serta dalam upaya membangun pemerintahan daerah, terdapat pada Kompetensi Dasar menganalisis upaya membangun pemerintahan daerah dan mendiskripsikan peran serta warga negara dalam pembangunan daerah. Diharapkan nilai kerjasama dan gotong-royong yang akan ditanamkan oleh siswa khususnya tentang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari uraian di atas terlihat jika implementasi peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lembang Bosang dalam Perspektif Perda No 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) masih belum bisa maksimal sebagaimana mestinya. Terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa khususnya di desa Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat pada pembangunan di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat peningkatan kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat pada pembangunan di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peningkatan kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi penulis dan pembaca adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam memperluas kajian aspek tentang kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Serta menambah konsep dan pemikiran baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut dibidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian yang dilakukan ini yaitu dapat dijadikan suatu referensi bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan suatu usaha untuk meningkatkan kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kapabilitas

Guna mengetahui dengan jelas pengertian kapabilitas, berikut ini akan dikemukakan pengertian kapabilitas yang diambil dari beberapa sumber. Pengertian kapabilitas Menurut kamus Bahasa Indonesia (2014) adalah: kapabilitas, artinya kompetensi, ialah kemampuan seseorang yang ada dalam dirinya. Kemampuan yang dimaksud disini ialah kemampuan seseorang tetapi tidak sebatas memiliki kemampuan saja akan tetapi lebih dari itu antara lain bisa menyakinkan seseorang bahwa mereka bisa melakukan selain dari kemampuan yang dia miliki, seperti dia ahli dalam bidang keadministrasian tetapi dia juga bisa mengerjakan bidang lainnya.

Menurut Menon dalam Purwanda (2019), kapabilitas adalah kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dapat memberikan nilai bagi organisasi dengan indikator-indikatornya yaitu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan menerima informasi.

1. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan (*Skill*) adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan di tempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang *programmer computer*, disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan hal yang paling di perhatikan adalah sikap prilaku karyawan. Orang yang dapat dikatakan sebagai orang terampil adalah orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan benar. Namun, apabila orang tersebut mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat tetapi hasilnya tidak sesuai atau salah maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang yang terampil. Apabila orang tersebut melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai apa yang diperintahkan, tetapi lambat dalam menyelesaikannya, maka orang tersebut dapat disimpulkan sebagai orang yang terampil.

Dalam hal ini, Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tujuan dibentuknya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam

menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Adapun tugas lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam melakukan tugas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga mudah diketahui oleh masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tugas

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

- c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat mengemukakan bahwa suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, Bangsa dan Negara.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Informasi yang di miliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya pengetahuan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang di bebaskan kepadanya, karyawan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam lembaga tersebut. Menon dalam Purwanda (2019).

Pengetahuan seseorang memang dapat dilihat dari pendidikan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam berfikir, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kemampuan intelektualnya akan semakin meningkat pula. Latihan atau pendidikan *non formal* yang berhubungan dengan yang ditekuni aparat, akan membuatnya lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Kemampuan aparat dapat diukur dari pengetahuan dan keterampilannya.

Pengetahuan diukur dari:

- a. Pendidikan formal yang diperoleh.

b. Pendidikan non formal, sejauh mana keikutsertaannya dalam kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, diklat-diklat, dan sebagainya.

Keterampilan diukur dari:

1. Sejauh mana penguasaan aparat terhadap tata kerja, prosedur dan proses kegiatan dalam organisasi.
2. Sejauh mana kemampuan aparat untuk bekerjasama dengan teman sekerjanya.
3. Sejauh mana kemampuan aparat keseluruhan. Ini dapat berwujud kemampuan aparat untuk menyesuaikan tindakan organisasi dengan situasi yang dihadapi, atau juga kemampuan untuk merubah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dirinya atau oleh organisasi.

Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis yang setaraf dengan vocational training kiranya amat dibutuhkan bagi pengembangan profesionalisme aparatur pegawai. Sementara itu, tingkat pendidikan formal perlu pula diberikan kesempatan bagi apratur pegawai untuk menyelesaikannya.

Sumber daya aparatur sebagai faktor produksi terpenting dalam organisasi Pemerintah Daerah harus selalu dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Kita semua menyadari bahwa peran aparatur pemerintah akan sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengemban misinya. Karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah daerah yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Pengetahuan dalam sebuah lembaga dilihat dari strategi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran baru terlihat apabila kebijaksanaan dan strategi itu dilaksanakan dengan baik. Jika keputusan telah diambil, manfaat keputusan itu baru terasa setelah dilaksanakan. Jika rencana dan program kerja telah diurus pelaksanaannya yang bisa membuktikan apakah rencana dan program kerja itu realistis atau tidak, dalam arti mempermudah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Kemampuan Menerima Informasi

Pentingnya kreativitas dalam strategi karyawan untuk menerima daya serap menerima informasi dengan baik. Kemampuan dalam menerima informasi yang tersedia perlu kita mulai dengan menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi yang didapat.

Berpikir kritis adalah berpikir rasional tentang sesuatu, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu tersebut yang meliputi metode-metode pemeriksaan atau penalaran yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan. Seseorang yang berpikir kritis memiliki ciri-ciri yaitu mampu berpikir secara rasional dalam menyikapi suatu permasalahan, mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah, dapat melakukan analisis, mengorganisasi, dan menggali informasi berdasarkan fakta yang ada, mampu menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah dan dapat menyusun argumen dengan benar dan sistematis.

Berpikir kritis untuk menemukan kesimpulan dan keputusan yang informatif, bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena keputusan dan kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis berbagai pendapat, asumsi, serta ide yang beragam dan bermacam-macam. Perbedaan ide atau gagasan tersebut akan membuat Anda berpikir kritis yaitu untuk menemukan kejelasan, persamaan, maupun perbedaan dari masing-masing kumpulan semua ide tersebut. Kemampuan berpikir kritis membuat Anda menganalisa kembali, mengidentifikasi, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengembangkan kembali semua ide dan segala asumsi hingga pada akhirnya kemudian akan memunculkan satu keputusan atau sebuah kesimpulan yang dianggap paling baik serta dapat dilakukan.

Banyak jenis pekerjaan yang menuntut Anda untuk berpikir kritis, bahkan hampir mayoritas pekerjaan mengharuskan Anda untuk berpikir kritis, baik itu usaha atau bisnis Anda sendiri maupun perusahaan-perusahaan tempat Anda bekerja. Berpikir kritis diperlukan dalam bekerja karena di dalam pekerjaan, Anda akan lebih sering dihadapkan pada kondisi dan keadaan dimana Anda harus mengambil keputusan atau kesimpulan, menganalisis bermacam-macam ide dan gagasan, mengevaluasi setiap pendapat yang muncul dari setiap orang yang berbeda, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Anda harus membiasakan diri untuk berpikir kritis dimanapun dan dalam situasi kapanpun. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda harus menggunakannya untuk mengambil keputusan yang harus segera diambil atau mendadak dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006* Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa “Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum di sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007* Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasiln pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

C. Partisipasi dalam Pembangunan Desa

Partisipasi pembangunan desa merupakan pelaksanaan sistem pemerintah desa yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan suatu desa. Adapun partisipasi pembangunan desa meliputi aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa perlu diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah sangat penting bagi kemajuan suatu desa. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participation yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan partisipasi berarti berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah peranserta anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa pendidikan melalui pelatihan, partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat.

Menurut Juliantara dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) substansi dari partisipasi adalah “bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat”, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat memudahkan situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. Menurut Juliantara dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control. Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut adalah:

- a. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

- b. *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
- c. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Menurut Mikkelsen dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menyatakan bahwa partisipasi adalah “suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu”. Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mubyarto “partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Sedangkan dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Berdasarkan pandangan diatas menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang dilaksanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang selanjutnya

merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para *stakeholders* pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dengan realita bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting yaitu dengan keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kemudian keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk didalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain, serta keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Keadaan diatas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam proses tahapan selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, Siagian dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menyatakan bahwa “karena kedinamisan individu-individu didalam masyarakat maka semakin lama semakin rumit pula kebutuhankebutuhan yang ingin dipuaskan”. Dipuaskan berarti sesuatu yang ingin dicapai dalam satu kegiatan pembangunan. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholder), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakannya untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan hal diatas, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam perencanaan merupakan program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama akan tetapi ada kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan, namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bagian dari program penilaian kebutuhan dan perencanaan program yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi cenderung menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya

dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan diatas menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang melengkapi pandangan dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsesus dalam kebijakan pembangunan dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul dimasyarakat.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sekilas pemberdayaan memiliki beberapa makna salah satunya adalah menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang orang yang telah mencapai tujuan kolektif

diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak

seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan. Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif *stakeholders* pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi.

D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/ kota.

Dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Menurut Widjaja dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menjelaskan bahwa “dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintah desa yang kuat dan mandiri”. Selanjutnya Widjaja dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menyebutkan bahwa kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa;
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintah desa dan paguyuban pemerintah desa;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas);

7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

E. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Kartasmita dalam Lasiman Sugiri (2012) menjelaskan bahwa upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi antara lain: 1) menciptakan suasana yang mungkin potensi masyarakatnya bisa berkembang seperti yang diharapkan. Dari sini terlihat bahwa adanya titik tolak yaitu setiap manusia, pengenalan bahwa setiap masyarakat, dan memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Maksud dari itu, semua adalah tidak ada masyarakat yang mempunyai daya karna jika itu terjadi maka akan menjadi punah. Seperti pada Peraturan Bupati (Perbup) Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2016 Pasal 22 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan ialah upaya untuk membangun daya itu, serta mendorong orang-orang untuk membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun langkah-langkah yaitu: untuk menciptakan suasana dan iklim. Hal ini meliputi langkah nyata, serta menyangkut penyediaan

berbagai masukan yang ada, dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Anwar dan Haryadi, 2004).

Upaya dalam pemberdayaan ini, yaitu upaya yang sangat pokok terhadap peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan serta akses dalam sumber sumber kemajuan ekonomi seperti informasi, teknologi, modal, pasar dan lapangan kerja. Pemberdayaan ini menyangkut yaitu pembangunan prasarana dan sarana secara fisik, (misalnya listrik , irigasi, jalan), maupun secara sosial seperti (fasilitas, sekolah dan pelayanan kesehatan), sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat secara cepat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga pelatihan, pemasaran di perdesaan, serta pendanaan, terhadap konsentrasi penduduk yang keberdayaannya sangat kurang. Oleh itu, perlu adanya program khusus terhadap masyarakat yang tidak berdaya, karena program umum yang berlaku tidak semua bisa dapat menjangkau masyarakat tersebut.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat

1. Faktor Pendukung Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Uno (2007), faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Motivasi

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri.

Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara motivasi dari dalam ialah motivasinya muncul dari inisiatif diri kita.

Pada dasarnya motivasi itu hanya dua, yaitu untuk meraih kenikmatan atau menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa menjadi motivasi kenikmatan maupun motivasi menghindari rasa sakit. Jika kita memikirkan uang supaya kita tidak hidup sengsara, maka disini alasan seseorang mencari uang untuk menghindari rasa sakit. Sebaliknya ada orang yang mengejar uang karena ingin menikmati hidup, maka uang sebagai alasan seseorang untuk meraih kenikmatan.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha yang sedikit banyak memerlukan pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Suatu kebijakan sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rinci, karena ia tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat jangka pendek akan tetapi juga akan digunakan untuk menanggulangi masalah dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk jangka waktu yang relatif panjang. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur

pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam praktek pemerintahan kebijaksanaan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya; a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada. b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada. c. Berorientasi kepada masa depan. d. Berorientasi kepada kepentingan umum. e. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

Namun demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti pidato, surat edaran.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

2. Faktor Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Munandar (2011) faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Anggaran

Dengan semakin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada perusahaan, maka ruang lingkup dan tugas yang dipikul oleh manajemen semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian adalah anggaran.

Secara sederhana anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan yaitu suatu rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran mutlak sekali diperlukan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Mengingat pentingnya anggaran bagi perusahaan, maka dalam penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan kepada perencanaan dan perhitungan yang matang serta melibatkan berbagai departemen tertentu.

Anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, dapat diterapkan terhadap berbagai macam bentuk badan usaha terutama pada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya tergantung kepada skala organisasi atau lembaga serta rumitnya masalah yang dihadapi. Namun demikian teknik dan prosedur pelaksanaannya mempunyai banyak kesamaan karena dilandasi oleh teori yang sama.

Suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di Kelurahan sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.

Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan:

- a. Menciptakan kenyamanan.
- b. Menciptakan kepuasan.
- c. Mempercepat proses kerja.
- d. Memudahkan proses kerja.
- e. Meningkatkan produktivitas.
- f. Hasil lebih berkualitas.

G. Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir mengemukakan bahwa Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang mempunyai 3 indikator kapabilitas dalam Menon (2019) yaitu: keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan menerima informasi. Dari ketiga indikator kapabilitas memiliki 2 faktor antara lain, faktor pendukung dan faktor penghambat. Jika faktor pendukung lebih dominan terhadap indikator kapabilitas (keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan menerima informasi) maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik terhadap

performa pembangunan kelurahan tetapi jika faktor penghambat lebih dominan terhadap indikator kapabilitas (keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan menerima informasi) maka akan berdampak buruk terhadap performa pembangunan kelurahan.

Gambar Kerangka Pikir Penelitian, sebagai berikut:



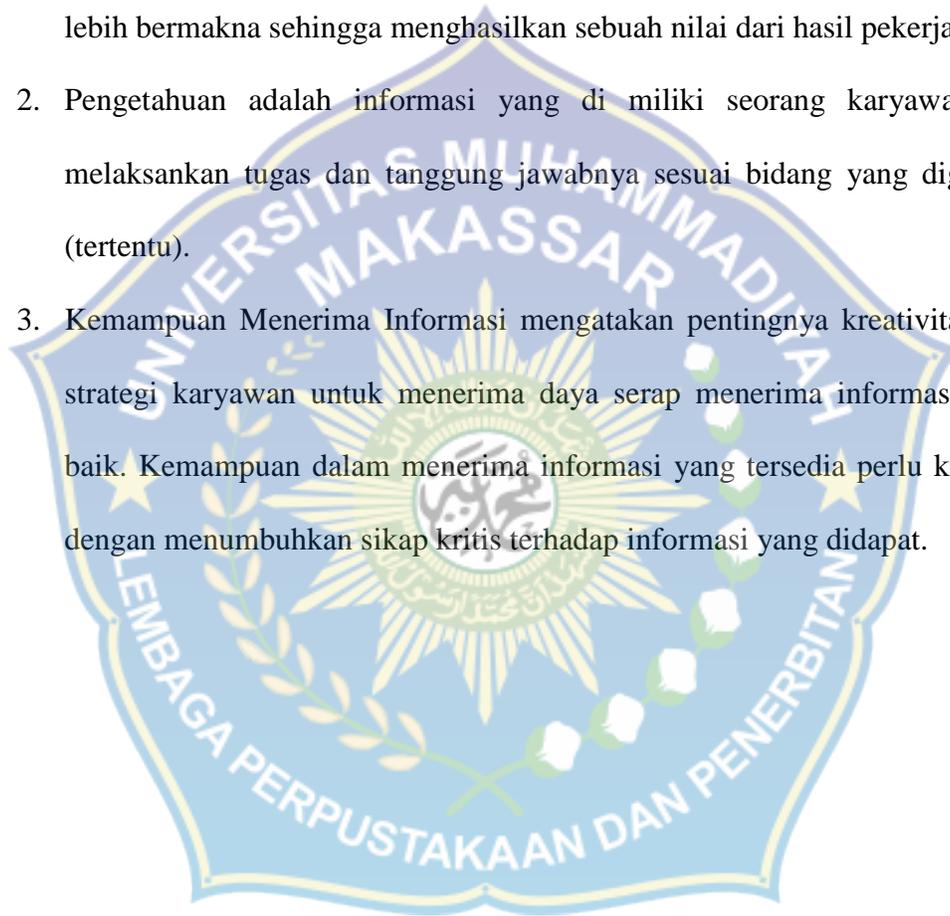
H. Fokus Penelitian

Performa Pembangunan Kelurahan
Fokus penelitian ini, penulis pada peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi: Keterampilan, Pengetahuan, dan Kemampuan Menerima Informasi, Faktor pendukung peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Faktor penghambat dalam peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Performa Pembangunan Kelurahan.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka dapat dikemukakan deskripsi fokusnya yaitu :

1. Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaannya.
2. Pengetahuan adalah informasi yang di miliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu).
3. Kemampuan Menerima Informasi mengatakan pentingnya kreativitas dalam strategi karyawan untuk menerima daya serap menerima informasi dengan baik. Kemampuan dalam menerima informasi yang tersedia perlu kita mulai dengan menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi yang didapat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 2 bulan setelah seminar proposal, yang dimana Kelurahan Lembang Bosang, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang terindikasi mengalami keterbelakangan dilihat dari sektor pemberdayaannya terutama di Kelurahan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah melalui penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ialah data dalam bentuk kata, kalimat, serta gambar. Artinya data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka-angka melainkan data tersebut melalui wawancara, pengamatan langsung, serta penelaahan tentang dokumen-dokumen terkait.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Bogdan dan Biglen dalam Yusuf (2016) menjelaskan bahwa tipe penelitian fenomenologi merupakan tipe penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam keadaan tertentu. Artinya suatu kesatuan sistem penelitian yang dilakukan untuk menemukan makna, menyelidiki proses serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai

kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang dapat langsung diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian. Berdasarkan Siyono dan Sodik (2015) bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah data dalam bentuk kata-kata, tindakan dan perilaku. Yang artinya Data Primer dapat diperoleh langsung dari lapangan dengan mengamati dan mewancarai. Oleh karena, itu penulis menggunakan sumber dari informasi yang terpilih.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu dokumen, foto-foto, benda-benda yang akan memperkaya data primer (Siyoto dan Sidik 2015). Yang artinya data sekunder diperoleh secara tidak langsung tetapi ada penelitian sebelumnya, seperti dokumen, buku-buku laporan, peraturan-peraturan pemerintah, dan data yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian

D. Informan Penelitian

Informan adalah suatu objek penting yang terdapat pada sebuah penelitian yang dimanfaatkan dalam memperoleh informasi tentang kondisi dan situasi penelitian. Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditetapkan situasi social penelitian, yang merupakan tempat dimana permasalahan

yang terjadi betul-betul ada. Informan yang telah terpilih merupakan informan kunci (*key Informan*) dalam penelitian ini yaitu merujuk pada orang-orang yang betul memahami tentang peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sehingga dapat memberi data yang benar. Informan pada penelitian tersebut berjumlah 9 orang dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling* (teknik acak) yang terkait Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana sebelumnya telah ditetapkan informan yang akan diwawancarai. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Tabel Informan

NO.	NAMA INFORMAN	INISIAL	PEKERJAAN
1	Hermanto Gani, SE.	HG	Lurah
2	Khoirul Setiawan, S.Pd.	KS	Seksi Pemberdayaan
3	Orizal, S.Pd.	OZ	Ketua LPM
4	Ferry Windarko, S.Pd.	FW	Sekretaris LPM
5	Mariati	MR	Tokoh Masyarakat
6	Siti Syamsiah	SS	Masyarakat
7	Jurniati	JN	Masyarakat
8	Salmiah	SM	Masyarakat
9	Rahmat Hidayat	RH	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan bagian dari mengumpulkan suatu data yang langsung dapat diperoleh dari lapangan. Observasi dalam penelitian ini adalah melihat penerapan peningkatan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan rekaman suatu kegiatan, yaitu pada penelitian berlangsung peneliti melakukan cara dengan melihat hal-hal yang dianggap penting. Perekaman tersebut berupa foto untuk memperoleh gambaran visual tentang penerapan peningkatan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Wawancara

Peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat langsung dari penerapan peningkatan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan dalam menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014). Ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah cukup banyak, oleh karena itu reduksi data adalah suatu proses dalam memilih suatu data. Seperti halnya

peneliti yang semakin lama dilapangan melakukan penelitian maka data yang diperoleh akan semakin banyak dan menimbulkan kerumitan. Untuk itu dilakukan proses pemilihan melalui reduksi data. Mereduksi data ialah memilih hal-hal penting, menggolongkan data, membuang hal-hal yang tidak perlu serta mengorganisasikan suatu data yang ditarik, dan disimpulkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu kumpulan informasi yang disusun dari penarikan kesimpulan pada penelitian. Penyajian dilakukan dengan bentuk bagan, uraian singkat serta hubungan antar kategori yang mudah diraih.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi

Penarikan kesimpulan dan verivikasi merupakan langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif. Kesimpulan pertama yang telah dikemukakan masih memiliki sifat sementara dan akan berubah ketika penganalisis (peneliti) menemukan bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika suatu data yang dikemukakan pada kesimpulan pertama telah didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan konsisten ketika penganalisis (peneliti) telah kembali kelapangan untuk melakukan tinjauan ulang dalam mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut kredibel.

G. Pengabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data, sebagai ushaa dalam memenuhi suatu kebenaran penelitian yang bersangkutan pada fenomena judul tersebut, oleh karena itu tersebut, maka paling tidak ada tiga Teknik yang penulis gunakan yaitu:

Pertama, teknik perpanjangan kehadiran dalam penelitian yaitu penulis memperpanjang waktu didalam mencari data dilapangan, mengadakan wawancara tidak hanya satu kali tetapi peneliti melakukan berulang kali, sehari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Hal ini penulis lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar, disamping itu penulis juga mengadakan ceking data sampai mendapat data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Melakukan pengamatan secara terus menerus termasuk kegiatan pengecekan data dengan menggunakan informan lain dalam menanyakan kebenaran suatu informasi serta data lain yang dianggap penting.

Kedua, teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2014:176) teknik triangulasi merupakan suatu pengecekan data dari beberapa sumber, cara dan beberapa waktu yang diperlukan. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi kedalam tiga macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu melakukan pengecekan data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menguji data yang sudah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan pengujian data. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu melakukan pengecekan suatu data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang telah diperoleh dari wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila pada tiga teknik tersebut dilakukan dalam menguji kredibilitas data akan menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi kembali pada sumber data yang lain agar memastikan suatu data itu benar atau sebagian benar karena memiliki sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang sudah dikumpulkan dari teknik wawancara pada pagi hari dimana narasumber masih kelihatan segar dan belum banyak tuntutan pekerjaan serta masalah maka peneliti akan memperoleh data valid dari wawancara sehingga data tersebut kredibel. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data dengan melakukan suatu pengecekan dalam bentuk wawancara, observasi dalam waktu serta situasi berbeda dan apabila hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda maka akan dilakukan observasi berulang-ulang sampai mendapatkan kepastian data.

Ketiga, adalah Teknik ketekunan pengamatan keabsahan data melalui ketekunan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Peneliti akan berusaha melakukan analisis secermat mungkin dalam menggali informasi atau data yang benar-benar dianggap penting.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Moluccan ([Maluku](#)) pada abad ke-14. Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama *Selayar*. Nama [Selayar](#) berasal dari kata *cedaya* ([bahasa Sanskerta](#)) yang berarti *satu layar*, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kata *cedaya* telah diabadikan namanya dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada [abad 14](#). Ditulis bahwa pada pertengahan abad 14, ketika [Majapahit](#) dipimpin oleh [Hayam Wuruk](#) yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini berarti bahwa armada [Gajah Mada](#) atau Laksamana Nala pernah singgah di pulau ini. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Pada masa lalu, [Pulau Selayar](#) menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa ([abad 17](#)), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke

timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus orang.

Jejak-jejak keberadaan orang Cina (Tiongkok) bermula pada tahun 1235 M, Raja Tallo I Makkadae Daeng Mangrangka melakukan perjalanan ke negeri Tiongkok dan menikah seorang Putri Penguasa setempat yang bernama Nio Tekeng Bin Sie Djin Kui. Sepulang dari Negeri Tiongkok Raja Tallo mampir dan bermukim Kampung Bonto Bangun Selayar. Selama di Selayar Raja Tallo melahirkan putra dan purti di antaranya Sin Seng (Putra), Tian Lay (Putra) dan Shui Lie Putri dan menjadi cikal bakal nenek moyang orang Tionghoa di Selayar.

[Belanda](#) mulai memerintah Selayar pada tahun [1739](#). Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesaghebber, WD Resident, atau *Controleur*. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun [1942](#). Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Regenschappen. Regenschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu". Dan kalau memang demikian, maka setidaknya-tidaknya ada sepuluh Regenschappen di Selayar kala itu, antara lain: Regenschappen Gantarang, Regenschappen [Tanete](#), Regenschappen [Buki](#), Regenschappen [Laiyolo](#), Regenschappen Barang-Barang dan

Reganschappen [Bontobangun](#). Di bawah Regaschappen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang. Pada tanggal [29 November 1945](#) (19 Hari setelah [Insiden Hotel Yamato](#) di [Surabaya](#)) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas [Heiho](#) bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial (sekarang kantor PD. Berdikari). Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal.

Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun Hari Jadi diambil dari tahun masuknya [Agama Islam](#) di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun [1605](#), sehingga ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah *29 November 1605*.

Geografi

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan [Pulau Sulawesi](#) dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan [Sulawesi](#) dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km² wilayah daratan (12, 91%) dan 9.146,66 km² wilayah lautan (87, 09%).

Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang berbatasan dengan:

Utara	Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone
Selatan	Provinsi Nusa Tenggara Timur
Barat	Laut Flores dan Selat Makassar
Timur	Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Berdasarkan letak sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kepulauan Selayar bahwa [Selat Selayar](#) dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan [Asia](#).

Iklm

Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus hingga September. Secara umum curah hujan yang terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musiman.

Topografi

Dipandang dari sudut topografinya Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai luas kurang lebih 1.357,03 Km² (wilayah daratan) dan terdiri dari kepulauan besar dan kecil serta secara administrative terdiri dari [11 kecamatan](#), [81 desa](#) dan [7 kelurahan](#) adalah variatif dari yang datar hingga agak miring.

Karakteristik daerah atau Topografi Kabupaten Selayar terdiri dari:

1. Batuan Induk Vulkanik

Terbentuk dari pertemuan jalur pegunungan muda sirkum mediterania dan sirkum pasifik, yang membentuk daratan Selayar adalah batuan yang cukup mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, oleh tenaga oksigen yang berlangsung lama, batuan itu lapuk membentuk tanah yang subur ini oleh pengaruh tenaga oksigen dapat berubah menjadi tanah karang seperti tanah laterit. Sebab itu perlu tindakan-tindakan konservasi, seperti sengkedan pada tanah-tanah miring, penggiliran tanah, pemupukan dan lain-lain.

2. Bentang Alam (Natural Landscape)

Dataran Selayar yang terjadi karena tenaga endogen (pengangkatan dan pelipatan) kemudian kemudian disusul dengan tenaga oksigen, membentuk bentang alam (*natural landscape*) yang beraneka ragam seperti:

- a. Pegunungan dengan ketinggian rata-rata 800 meter sehingga tidak cukup untuk terjadinya hujan orografis pegunungan, di punggungnya hutan tutupan dan di lerengnya perkebunan tanaman pohon kerea yang berakar panjang serta berumur panjang. Tanaman dengan pohon lunak seperti [vanili](#), [merica](#), [kentang](#), [kol](#) dan lain-lain diperlukan sengkedan untuk mencegah erosi dan longsor.
- b. Daerah curam, aspek geografisnya adalah kawasan hutan (hutan tutupan) untuk mencegah longsor
- c. Daratan tinggi, aspek geografisnya, adalah:
 - Baik untuk pemukiman, karena udara sejuk dan drainasinya mudah diatur dan tidak tergenang
 - Perkebunan bagi tanaman budi-daya yang memerlukan udara sejuk, seperti cengkih, jagung Meksiko dan lain-lain
 - Horti kultura, seperti sayur mayur, kentang bunga-bunga dan bonsai
 - Pusat-pusat kesehatan seperti sanatorium
 - Pusat-pusat pelatihan, kantor-kantor, hotel-hotel, tempat rekreasi dan lain-lain
- d. Daerah-daerah ledok dan lembah, aspek geografisnya adalah:
 - Tempat akumulasi/persediaan air untuk daerah sekitarnya. Dengan pompanisasi dapat dialirkan ke daerah-daerah ketinggian.

- Daerah pertanian tanaman pangan, seperti sayur mayur kangkung, bayam jagung lokal, kaca-kacangan dan lain-lain
- Tanah daratan rendah, aspek geografisnya adalah:
 - a. Untuk perkebunan, seperti kelapa dan coklat
 - b. Untuk pertanian menetap, seperti sawah dan huma.
- Tanah rawa-rawa, aspek geografisnya adalah:
 - a. Kawasan pohon nipa, tempat ikan bertelur, bahan baku gula merah dan atap tradisional yang indah dan sejuk
 - b. Empang dan pembuatan garam
 - c. Kawasan bakau, tempat ikan bertelur dan berlindung, serta mencegah abrasi
- Daerah berbukit-bukit dan tanah bergelombang, aspek geografisnya adalah:
 - a. Baik untuk pemukiman, sebab udara sejuk, drainasinya mudah diatur, diwaktu malam tampak indah bagai pelaut yang menuju ke Selayar
 - b. Perkebunan, tanaman budi daya seperti cengkih, coklat dan kelapa.
 - c. Pertanian tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi harus bertaras supaya tidak terjadi erosi.
- e. Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - Daerah aliran sungai (DAS), aspek geografis satu-satunya adalah kawasan hutan hidrologi (hutan tata air)
 - Daerah berbatu-batu

- a. Daerah yang berbatu-batu di bagian utara, aspek geografisnya hutan tutupan. Baik juga untuk hutan produksi, seperti jati dan holasa (kayu bitti). Hanya eksploitasinya tebang pilih dan tebang ganti serta rerumputan untuk pakan ternak.

Geologi

Kondisi geologi pulau Selayar merupakan kelanjutan dari wilayah geologi Sulawesi Selatan bagian Timur yang tersusun oleh jenis batuan *sediment*. Struktur geologi [Kepulauan Selayar](#) menunjukkan struktur-struktur dan penyebaran batuan berarah Utara - Selatan dan miring melandai kearah Barat. Sedangkan pantai Timur umumnya terjal dan langsung dibatasi oleh laut dalam yang cenderung merupakan jalur sesar.

Statigrafi batuan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari:

- Endapan rasa manis alluvial dan endapan pantai terdiri atas kerikil pasir, lempung Lumpur dan batu gamping *cral (Qac)*.
- Satuan formasi Kepulauan Selayar *walanae* mencakup batu gamping, batu pasir, batu lempung, konglomerat dan tufa (Tmps) yang terdapat di sisi Barat hingga ujung [Pulau Selayar](#).
- Satuan formasi batuan gunung api camba, meliputi breksi, lava, konglomerat dan tufa yang terdapat pada bagian Selatan Pulau Selayar.
- Formasi camba, terdiri dari batuan sediment laut berseling dengan batuan gunung api (Tmc) terdapat pada sepanjang pantai Timur Pulau Selayar.

- Formasi *walanae*, terdiri dari batu pasir, konglomerat, tufa, batu danau, batu gamping dan napal (Tmrv) terdapat pada ujung bawah pantai Barat Pulau Selayar.

B. Visi Dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi:

"Teciptanya Pelayanan Prima dalam mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim".

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
2. Mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang utuh
3. Memposisikan Selayar sebagai sub system dalam system transportasi nasional baik darat, laut maupun udara.
4. Mendorong transformasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritime yang religius.

C. Struktur Organisasi LPM Lembang Bosang

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan

Lurah dalam memberdayakan masyarakat. LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

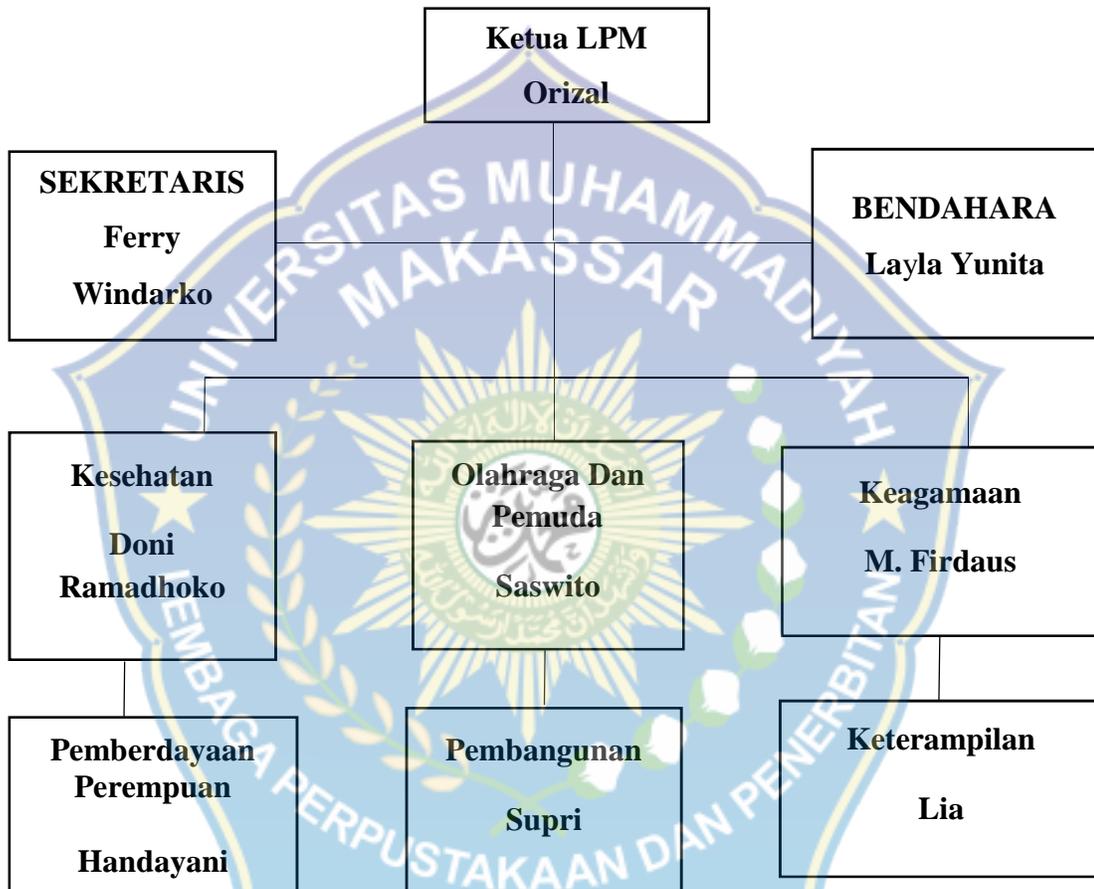
Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas:

Susunan pengurus terdiri dari:

- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
- 1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
 - 2) Pengurus LPM tidak boleh dirangkap Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - 3) Memasukkan unsur perempuan dalam pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 - 4) Pemilihan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dan dipimpin oleh Kepala Desa.

5) Masa bakti pengurus LPM di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Struktur Organisasi LPM Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi LPM Lembang Bosang

D. Gambaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sering disingkat dengan (LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau yang dikenal dengan LKMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menurut

pasal 1 point (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa atau keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian proses pemberian fungsi dan peranan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga adanya keseimbangan pada masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok atau kelembagaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan lembaga yang diakui dan dibina oleh pemerintah, pemberian pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan LPMK dengan wujud penertiban SK oleh Lurah tentang kelembagaan LPMK. LPMK juga dibina oleh pemerintah dengan berbagai bentuk pembinaan.

Keanggotaan lembaga LPMK diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, anggota LPMK berasal dari tokoh masyarakat yang ada di wilayah kelurahan, dan bukan tokoh masyarakat yang pada saat itu sedang menjabat

pada lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, seperti Ketua lembaga RT, Ketua lembaga RW, Ketua lembaga PKK kelurahan, dan Ketua lembaga Karang Taruna, atau ketua lembaga kemasyarakatan kelurahan (lainnya).

Anggota LPM pada umumnya diisi masyarakat yang berasal dari orang-orang berlatar belakang perguruan tinggi atau akademisi, guru sekolah, atau pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah, hal ini dikarenakan tugas yang diamanahkan kepada LPM cukup berat dan strategis, dimana LPM diberikan tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan, sehingga membutuhkan keahlian di bidang perencanaan pembangunan dan tingkat pendidikan yang lebih baik.

Perencanaan yang disusun LPM merupakan salah contoh dari proses perencanaan yang berawal atau berproses dari bawah ke atas, atau sering juga disebut dengan perencanaan partisipatif, perencanaan partisipatif ini disusun oleh masyarakat sendiri melalui LPM, oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang memahami tentang perencanaan pembangunan, khususnya untuk anggota LPM.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan memiliki fungsi yang jelas dan diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2000, berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri, dinyatakan fungsi LPM adalah:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menamam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembnagunan secara partisipatif, menggerakkan partisipasi dan prakarsa masyarakat secara gotong royong, dan mendayaguna sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, fungsi LPM dalam membantu tugas lurah berperan sebagai:

- a. Motivator masyarakat
- b. Inspirator pembagunan
- c. Mediator masyarakat dengan pemerinta
- d. Aspirator masyarakat

Lembaga LPM juga diberikan berbagai bentuk kewajiban, diantaranya; membantu pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dan peraturan perundang undangan yang berlaku, ikut membantu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah

dan swasta membantu menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, seperti juga membantu Lurah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam membantu tugas Lurah, berkewajiban sebagai:

1. Eksekutor kebijakan
2. Stabilisator kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3. Mediator masyarakat dengan pihak lain

E. Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

Kapabilitas adalah kemampuan seseorang tetapi tidak sebatas memiliki kemampuan saja akan tetapi lebih dari itu antara lain bisa menyakinkan seseorang bahwa mereka bisa melakukan selain dari kemampuan yang dia miliki, seperti dia ahli dalam bidang keadministrasian tetapi dia juga bisa mengerjakan bidang lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sering disingkat dengan (LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau yang dikenal dengan LKMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menurut pasal 1 point (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dan Lurah dalam

menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa atau keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.

Menurut Menon dalam Purwanda (2019), kapabilitas adalah kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dapat memberikan nilai bagi organisasi dengan indikator-indikatornya yaitu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan menerima informasi.

1. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan (*Skill*) adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan di tempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang *programmer computer*, disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan hal yang paling di perhatikan adalah sikap prilaku karyawan. Orang yang dapat dikatakan sebagai orang terampil adalah orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan benar. Namun, apabila orang tersebut mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat tetapi hasilnya tidak sesuai atau salah maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang yang terampil. Apabila orang tersebut melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai apa yang diperintahkan, tetapi lambat dalam menyelesaikannya, maka orang tersebut dapat disimpulkan sebagai orang yang terampil.

Dalam hal ini, Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tujuan dibentuknya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Adapun tugas lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam melakukan tugas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga mudah diketahui oleh masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

3. Tugas

- d. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- e. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- d. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- e. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- f. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

Berdasarkan dari uraian diatas wawancara yang dilakukan penulis kepada Lurah Lembang Bosang menerangkan bahwa:

“Dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan pihak lembaga pemberdayaan masyarakat dinilai telah melaksanakan pengawasan yang sesuai dari prosedur yang telah ditetapkan” (Hasil Wawancara 14 Mei 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh Seksi Pemberdayaan mengatakan:

“Kami dari selaku seksi pemberdayaan telah banyak melaksanakan program atau tugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengikuti

pelatihan dan pembinaan yang pelaksanaannya tetap dalam pengawasan dan prosedur yang telah ditetapkan” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas bahwa tugas dari lembaga pemberdayaan masyarakat dinilai telah melaksanakan pengawasan yang sesuai dari prosedur yang ada. Dari pihak seksi pemberdayaan mempererat kembali apa yang sudah di kemukakan bahwasanya sudah melaksanakan program atau tugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan dalam pelaksanaannya ini tetap berada digaris pengawasan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibenarkan oleh Ketua LPM, mengatakan:

“Dalam aspirasi masyarakat yang kami tampung bersama untuk pelatihan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lembang Bosang keseluruhan kegiatan dapat terlaksana dan berjalan optimal” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Menurut penjelasan di atas dapat dibenarkan bahwa dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan pihak lembaga pemberdayaan masyarakat dinilai telah melaksanakan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari segi pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat tetapi pelaksanaannya tetap dalam pengawasan yang sesuai dari prosedur yang telah ditetapkan.

Pengawasan yaitu sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah

fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Pada umumnya setiap organisasi/lembaga sering terjadi suatu kesenjangan antara kebutuhan akan promosi tenaga kerja yang diharapkan oleh organisasi/lembaga dengan kemampuan tenaga kerja dalam merespon kebutuhan, organisasi/perusahaan perlu melakukan suatu upaya untuk menjembatani kesenjangan ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi/lembaga adalah melalui program pelatihan. Melalui program pelatihan diharapkan seluruh potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan

sesuai dengan keinginan organisasi/lembaga atau setidaknya mendekati apa yang diharapkan oleh organisasi/lembaga tersebut.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Adapun yang dikatakan oleh Sekretaris LPM, mengatakan:

“Dari beberapa program yang telah direncanakan oleh LPMK secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, baik itu dari segi kegiatan sosialisasi, kewenangan formal maupun non formal disisi lain lembaga pemberdayaan masyarakat menyediakan sarana untuk menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas dan hasil pengamatan yang penulis lakukan, menilai bahwa aspirasi masyarakat yang telah ditampung bersama melalui program yang telah direncanakan di Kelurahan Lembang Bosang telah berjalan dengan baik, yang diadakan oleh LPMK melalui kegiatan sosialisasi seperti Anti Narkoba. Dalam hal ini, adapun tanggapan informan dari salah satu tokoh masyarakat, mengatakan:

“Kami selaku tokoh masyarakat menilai bahwa tugas LPMK melalui program program dan kegiatan yang telah dilaksanakan LPMK sangat membantu masyarakat dalam pengembangan kompetensi dan kreativitas masyarakat karena adanya pelatihan dan pemberdayaan, dan juga adanya kegiatan sosialisasi dan

tersedianya sarana untuk mengembangkan aspirasi masyarakat” (Hasil Wawancara 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas kami menyimpulkan bahwa salah satu tokoh masyarakat beranggapan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan LPMK sangat membantu masyarakat dalam pengembangan kompetensi dan kreativitas masyarakat karena adanya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal ini dibenarkan oleh salah satu masyarakat, mengatakan:

“Dengan adanya LPMK sangat membantu peningkatan kualitas SDM sehingga memperkuat dalam memupuk rasa persatuan serta rasa gotong royong masyarakat selain itu potensi SDA dapat menjadikan aspirasi masyarakat” (Hasil Wawancara 17 Mei 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa LPMK sudah membantu masyarakat dalam hal peningkatan SDM untuk memperkuat dalam memupuk rasa persatuan serta rasa gotong royong masyarakat dan potensi SDA bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa menjadi aspirasi masyarakat. Uraian di atas sejalan dengan pernyataan atau tanggapan sebagai warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar mengungkapkan bahwa:

LPMK sangat membantu peningkatan kualitas SDM sehingga memperkuat dalam memupuk rasa persatuan serta rasa gotong royong masyarakat selain itu potensi SDA dapat menjadikan aspirasi masyarakat juga bisa mensejahterakan masyarakat setempat dan bisa dikatakan lebih mandiri dari pada sebelum LPMK dibentuk dan penyaluran aspirasi masyarakat lebih mudah dan kualitas pelayanan pemerintahan menjadi lebih baik.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat mengemukakan bahwa suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, Bangsa dan Negara. Dalam hal ini, adapun tanggapan informan yaitu ketua LPMK, mengatakan:

“Di lihat dari tanggung jawab LPMK, aspek kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah terlaksana masih ada beberapa program kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai jadwal atau melewati batas waktu yang ditentukan terkadang berdampak pada efisiensi jadwal program lainnya” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Dalam hal ini, Senada adapun tanggapan informan yang berinisial Seksi pemberdayaan, mengatakan:

“Proses program kegiatan yang terlaksana sudah berjalan cukup baik, namun disisi lain tanggung jawab pihak LPMK dalam menyampaikan informasi atau sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak LPMK belum merata ke seluruh masyarakat. Hal ini menimbulkan banyak masyarakat yang belum paham terhadap arah dan tujuan program kegiatan tersebut” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas kami menyimpulkan bahwa proses program kegiatan yang terlaksana sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam tahap penyampaian informasi atau sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak LPMK belum merata ke seluruh masyarakat. Tetapi masih banyak yang belum memahami arah dan tujuan program kegiatan yang ada di lembaga pemberdayaan masyarakat.

Adapun bentuk tanggung jawab LPMK yaitu memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan Kegiatan dan program, pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang kegiatan pelayanan kepada

masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi publik, karena itu birokrasi dalam melayani masyarakat harus menghilangkan kesan umum yang negatif untuk dapat disebut birokrasi yang responsif terhadap pelayanan umum dalam menyediakan fasilitas umum dan pelayanan yang cepat. Ini semua tidak mudah tetapi harus dipilih guna memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat atau ditingalkan, tidak mendapat dukungan atau simpati rakyat yang berjuang pada krisis kepercayaan.

Dalam hal ini, adapun tanggapan informan ketua LPMK, mengatakan:

”kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan program LPMK, tentunya juga kami selalu mengharapkan dukungan dan kerja sama setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan program sehingga berjalan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri” (Hasil wawancara 15 Mei 2019).

Dalam hal ini telah dibenarkan salah satu dari tokoh masyarakat, mengatakan:

“Pelaksanaan kegiatan dan program LPMK lebih bisa ditingkatkan lagi dari segi kerjasama atau dukungan dari masyarakat itu sendiri sehingga harapan masyarakat bisa diwujudkan dan bisa berjalan dengan baik” (Wawancara Hasil 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas kami menyimpulkan bahwa pelayanannya sudah bagus kepada seluruh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan dan program LPMK, tetapi kami sebagai pengurus LPMK selalu mengharapkan dukungan dan kerjasama setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan program sehingga harapan masyarakat bisa berjalan baik sesuai yang diharapkan.

Dilihat dari program yang diterapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang telah berjalan dengan baik. Dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan pihak lembaga

pemberdayaan masyarakat telah banyak melaksanakan program atau tugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pembinaan. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang telah banyak menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat yang dimana pelaksanaannya tetap dalam pengawasan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bentuk pengawasan yang dimaksud dalam lembaga pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi ataupun tidak selamanya dalam pelaksanaan pekerjaan, tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi/lembaga adalah melalui program pelatihan. Melalui program pelatihan diharapkan seluruh potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan sesuai dengan keinginan organisasi/lembaga. LPMK juga mengadakan kegiatan sosialisasi lain yaitu pembinaan. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mengembangkan suatu dasar-dasar yang ada dalam setiap individu serta kemampuan lainnya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri meningkatkan dan mengembangkan dirinya, serta kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Jika dilihat dari sisi pelayanan yang diterapkan di lembaga pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan program LPMK, tetapi kami sebagai pengurus LPMK selalu mengharapkan dukungan dan kerjasama setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan program sehingga harapan masyarakat bisa berjalan baik sesuai yang diharapkan.

Kegiatan Yang Dilaksanakan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2007, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas yaitu : menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan. Maka berdasarkan kepada pengertian tersebut, LPM sebenarnya memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis yaitu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan disegala bidang. Hal ini berarti pula bahwa segala aktifitas pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan baik fisik maupun non fisik dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan dan yang lainnya dikoordinasikan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai mitra Lurah dalam menampung aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, maka LPM kelurahan Lembang Bosang mencoba menyusun program dan kegiatan yang diselenggarakan

dengan Tugas Pokok dan kebutuhan masyarakat serta visi dan misi Kelurahan Lembang Bosang. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup:

1. Administrasi Dan Surat Menyurat

- a. Membuat surat tertulis Kepada Lurah Lembang Bosang (Bp. Hermanto Gani, SE.) perihal pengelolaan UEDSP, BUMKEL dan BKM yang tidak jelas
- b. Membuat surat kepada Lurah Lembang Bosang (Sdr. Eko Haryanto) mempertanyakan dan mengingatkan perihal BOP RT /RW yang di tahan-tahan dengan tembusan Camat Bontomanai
- c. Membuat surat kepada Bupati Kepulauan Selayar
- d. Membuat surat permohonan partisipasi perbaikan jalan
- e. Membuat proposal perbaikan jalan kepada Dinas PU kabupaten Kepulauan Selayar
- f. Membuat proposal perbaikan rumah tidak layak huni kepada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

2. Organisasi

Pada awal terbentuknya kepengurusan LPM periode 2011-2014 jumlah pengurus sebanyak 20 (dua puluh) orang. Sesuai SK Kepala Kelurahan Lembang Bosang Nomor 410.22/11-kel.2011 tentang Pengesahan dan Penetapan pengurus LPM Periode 2011-2014 maka kepengurusan berakhir pada tanggal 13 Maret 2014. Berkaitan hal tersebut Ketua LPM telah mengirimkan surat kepada Kepala Kelurahan Lembang Bosang tentang habisnya masa kepengurusan dan mohon segera dilakukan pemilihan Ketua LPM yang baru. Namun demikian sesuai surat Kepala

Kelurahan Lembang Bosang bahwa kepengurusan LPM diperpanjang sampai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.

3. Kegiatan Rapat, Pertemuan, Pelantikan dan Upacara

- a. Mengadakan rapat/pertemuan internal pengurus LPM untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
- b. Mengikuti/menghadiri rapat-rapat koordinasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan maupun Kecamatan Bontomanai
- c. Mengikuti rapat musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten
- d. Menghadiri pelantikan pengurus RW di lingkungan Kelurahan Lembang Bosang, KPPS dan lainnya
- e. Menghadiri undangan-undangan
- f. Mengadakan pertemuan dengan Lurah Hermanto Gani, SE. untuk minta penjelasan tentang Kegiatan dan penggunaan APBD untuk masyarakat yang tidak jelas dan tidak transparan
- g. Mengadakan urun rembug dengan mengundang para Ketua RW, tokoh masyarakat, aparat Kelurahan Lembang Bosang dan Aparat Kecamatan untuk menindaklanjuti mengenai perilaku Lurah Hermanto Gani, SE. yang tidak transparan dalam penggunaan dana APBD khususnya bantuan untuk stimulant dan sarana infrastruktur masyarakat.
- h. Mengikuti Upacara Peringatan HUT RI di Kecamatan Bontomanai dan Lapangan Pemuda Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

- i. Menghadiri dan mengikuti kegiatan lainnya baik yang diadakan oleh Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten atau pihak lainnya

4. Kegiatan Infrastruktur

- a. Pada tahun 2013 melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur dari DPA Kelurahan Lembang Bosang melalui swakelola sebanyak 16 buah kegiatan di 16 lokasi rw senilai Rp 131.260.000,-
- b. Perbaiki plang batas wilayah antar rukun warga
- c. Melaksanakan kegiatan infrastruktur senilai Rp 361.950.000 untuk 24 buah kegiatan yang dibiayai DPA Kelurahan Lembang Bosang tahun 2014.

5. Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial diarahkan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang mengalami berbagai permasalahan sosial yang dilaksanakan melalui Gerakan Lembang Bosang Peduli. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

- a. Kegiatan Bakti Sosial berupa Penyuluhan Bencana , Simulasi Gempa buat anak-anak SD dan orang tua, Permainan anak-anak dan yang mencakup : membuat yel-yel kelompok masing-masing SD, Lomba ketangkasan permainan Hulahup, Tangkap Bola dan membuat lingkaran yang diikuti sebanyak 76 orang.
- b. Penyuluhan dan Simulasi Gempa yang diikuti oleh anak-anak penerima bantuan, orang tua siswa, guru pendamping dan para kader posyandu.
- c. Pemberian THR kepada anak-anak dari keluarga kurang

- d. Pendistribusian zakat maal tahun 2013 kepada mustahik (Fakir, Miskin, Yatim Piatu) kepada 50 Kepala Keluarga di Wilayah Kelurahan Lembang Bosang sejumlah Rp 10.650.000,
- e. Bekerjasama dengan Bidan Desa dan Kader Posyandu melakukan pendataan Rumah Tangga Sangat Miskin, Penyandang Cacat, Anak Balita dan Lanjut Usia
- f. Melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) keluarga miskin di Kelurahan Lembang Bosang untuk diusulkan ke Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
- g. Mendistribusikan beras bantuan Bupati Kepulauan Selayar kepada keluarga miskin

6. Sumber Dana

Selama periode 2011 – 2014, LPM Kelurahan Lembang Bosang mendapat dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa Biaya Operasional (BOP) seperti halnya RT dan RW. Sedangkan untuk operasional pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh LPM, kami berupaya untuk mencari dana atau menggunakan biaya operasional tersebut untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Termasuk menyisihkan dari kegiatan-kegiatan swakelola pembangunan fisik atau kegiatan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah kelurahan Lembang Bosang. Untuk kegiatan sosial yang dilaksanakan melalui Gerakan Lembang Bosang Peduli sumber dana berasal dari sumbangan masyarakat, donatur dan zakat maal.

7. Kendala / Hambatan Yang Dialami

Dalam menjalankan program kerja / kegiatan yang telah direncanakan, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dialami baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala tersebut antara lain :

- a. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh beberapa pengurus menyebabkan semakin berkurangnya pengurus LPM yang aktif. Dari 20 orang pengurus yang ditetapkan sampai saat ini hanya 18 orang yang masih aktif. Padahal LPM selalu mencoba untuk melakukan kaderisasi Pengurus kepada masyarakat.
- b. Keterbatasan sumber dana: LPM senantiasa berupaya mencari terobosan dan inovasi program untuk menyentuh dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat baik yang bersifat pelatihan, penyuluhan maupun dalam bentuk menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat bahkan dalam bentuk pemberian bantuan stimulant kepada masyarakat yang memerlukan.
- c. Masih sulitnya mengkoordinasikan berbagai program kemasyarakatan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Lembang Bosang sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
- d. Masih adanya Pengurus RW/RT dan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan LPM termasuk tugas pokok dan fungsinya.
- e. Tidak jelasnya sistem pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya terhadap LPM walaupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2007 jelas dan

tegas bahwa Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib melakukan pembinaan terhadap LPM.

3. Pengetahuan (*knowledge*)

Informasi yang di miliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya pengetahuan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang di bebankan kepadanya, karyawan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam lembaga tersebut. Menon dalam Purwanda (2019).

Pengetahuan seseorang memang dapat dilihat dari pendidikan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam berfikir, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kemampuan intelektualnya akan semakin meningkat pula. Latihan atau pendidikan non formal yang berhubungan dengan yang ditekuni aparat, akan membuatnya lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Kemampuan aparat dapat diukur dari pengetahuan dan keterampilannya.

Pengetahuan diukur dari:

1. Pendidikan formal yang diperoleh.
2. Pendidikan non formal, sejauh mana keikutsertaannya dalam kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, diklat-diklat, dan sebagainya.

Keterampilan diukur dari:

4. Sejauh mana penguasaan aparat terhadap tata kerja, prosedur dan proses kegiatan dalam organisasi.
5. Sejauh mana kemampuan aparat untuk bekerjasama dengan teman sekerjanya.

6. Sejauh mana kemampuan aparat keseluruhan. Ini dapat berwujud kemampuan aparat untuk menyesuaikan tindakan organisasi dengan situasi yang dihadapi, atau juga kemampuan untuk merubah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dirinya atau oleh organisasi.

Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis yang setaraf dengan vocational training kiranya amat dibutuhkan bagi pengembangan profesionalisme aparatur pegawai. Sementara itu, tingkat pendidikan formal perlu pula diberikan kesempatan bagi apratur pegawai untuk menyelesaikannya.

Sumber daya aparatur sebagai faktor produksi terpenting dalam organisasi Pemerintah Daerah harus selalu dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Kita semua menyadari bahwa peran aparatur pemerintah akan sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengemban misinya. Karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah daerah yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Kami bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan dalam sebuah lembaga dilihat dari strategi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran baru terlihat apabila kebijaksanaan dan strategi itu dilaksanakan dengan baik. Jika keputusan telah diambil, manfaat keputusan itu baru terasa setelah dilaksanakan. Jika rencana dan program kerja telah diurus pelaksanaanlah yang bisa membuktikan apakah rencana dan program kerja itu realistis atau tidak, dalam arti

mempermudah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, adapun tanggapan informan yang berinisial Seksi pemberdayaan, mengatakan bahwa:

“Semua pelaksanaan tugas yang telah diberikan harus diketahui lebih dulu melalui strategi yang telah ditetapkan maka dengan ini petugas akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh informan Lurah Lembang Bosang, mengatakan:

“Sebelum melakukan tugas, petugas telah melakukan perencanaan terlebih dahulu tentang bagaimana strategi, pelaksanaan serta tugas yang telah dibebankan kepadanya, sehingga mereka bisa memprediksi dengan strategi yang telah ditentukan” (Hasil Wawancara 14 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas bahwa penerapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar informasi mengatakan bahwa petugas telah melakukan perencanaan terlebih dahulu tentang bagaimana strategi yang ditetapkan, serta pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya, sehingga mereka bisa memprediksi strategi apa yang lebih baik dalam lembaga tersebut.

Untuk menjadi seorang aparatur yang berkemampuan tinggi paling tidak harus memiliki tarap pendidikan yang tinggi pula, sebab pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran yang paling dasar terhadap kemampuan seseorang. Disamping itu juga harus mempunyai pengalaman yang luas dan terlatih untuk bidang pekerjaannya. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Lembang Bosang cukup bervariasi, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun rincian

keadaan penduduk Lembang Bosang berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Anggota LPM Di Kelurahan Lembang Bosang

No	Nama	Riwayat Pendidikan	Keterangan
1	Orizal, S.Pd	S1	
2	Ferry Windarko, S.Pd	S1	
3	Layla Yunita, SE	S1	
4	Doni Ramadhoko, S.Sos	S1	
5	Saswito, S.Pd	S1	
6	M. Firdaus, S.Pd	S1	
7	Handayani, S.Sos	S1	
8	Supri, SE	S1	
9	Lia, S.Pd	S1	
10	Anazmudin	SLTA	
11	Umi kulsum	SLTA	
12	Mawadah	SLTA	
13	Ari ruddy Y	SLTA	
14	Hamjiah	SLTA	
15	Ahmad Ahsan	SLTA	
16	Pandi	SLTA	
17	Muh. Arham	SLTA	
18	Salmiah	SLTA	
19	Jurniati	SLTA	
20	Siti Syamsiah	SLTA	

Sumber: Kelurahan Lembang Bosang Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan tabel di atas bahwa anggota lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Lembang Bosang berjumlah 20 orang dan riwayat pendidikan para anggota LPMK di dominasi tingkat pendidikan Diploma sampai sarjana, namun ada juga beberapa anggota yang tingkat pendidikannya setara dengan SLTA.

LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kelurahan Lembang Bosang dilihat dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakatnya sudah memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong. Se jauh ini pula pelaksanaan LPMK di Kelurahan Lembang Bosang yang dimana sebagai mitra dari lurah di dalam system pemerintahan kelurahan sudah menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik.

Mengali, Pendayagunaan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya

Dalam fungsi ini, LPMK lebih berperan sebagai pemberdaya bagi masyarakat agar masyarakat bisa menerima, mengolah, dan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kepentingan dan kesejahteraan individu maupun kelompok dalam hal ini adalah masyarakat. Dan yang dimaksud disini adalah pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Terkait sumber daya yang dimiliki tidak hanya untuk pendayagunaan dan pengembangan pembangunan fisik saja, namun juga terdapat pembangunan non fisik. Dan LPM Kelurahan Lembang Bosang lebih dominan melakukan pengali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya yang bersifat non fisik atau lebih mengarah pada kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menentukan kemandirian masyarakat, dan agar bisa bersaing, siap, dan bisa menyesuaikan diri terhadap dinamika yang pasti akan terjadi dimasyarakat itu sendiri. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan LPM Kelurahan Lembang Bosang dalam mengali,

pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya yang ada di Kelurahan Lembang Bosang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Kegiatan Dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
1	Pembuatan Surat Izin Operasi (SIO)	Masyarakat
2	Pelatihan Menjahit	Masyarakat

Sumber : LPM Kelurahan Lembang Bosang Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan LPM Kelurahan Lembang Bosang berorientasi pada pembangunan/pengembangan sumberdaya manusia, dan dapat dilihat bentuk kegiatan berupa pelatihan Rigger, pelatihan operator alat berat, yang lebih sering dilakukan di Lembaga yang bersangkutan atau yang diminta untuk melakukan pelatihan tersebut, sedangkan untuk pelatihan Driver ada yang dilakukan di Kelurahan Lembang Bosang atau pun yang dilakukan di luar Kota. Sementara untuk pembuatan Surat Izin Operasi (SIO), LPM berperan dalam mengkoordinasikan kepada Lembaga yang ditentukan sesuai dengan kemampuan dan pelatihan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Kemudian untuk Surat Izin Operasi (SIO) sangat penting untuk masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan. Karena tanpa surat izin operasi, masyarakat yang ingin bekerja tidak dapat diterima di Lembaga. Kemudian untuk pelatihan menjahit, dilakukan di Kelurahan Lembang Bosang. Dari beberapa kegiatan Yang dilakukan LPM Kelurahan Lembang Bosang seperti yang dijelaskan diatas, sasaran kegiatannya

adalah Masyarakat Kecamatan Bontomanai secara umum, dan secara Khusus untuk Masyarakat Kelurahan Lembang Bosang.

Penumbuhkembangan Dan Penggerak Prakarsa Dan Partisipasi, Serta Swadaya Gotong Royong Masyarakat

LPMK merupakan penggerak dalam hal membangun kesadaran masyarakat agar dapat lebih terlibat pada tahapan-tahapan pengembangan ataupun pembangunan, dan kemudian bagaimana masyarakat bisa menjaga pembangunan tersebut agar bisa bermanfaat dan efektif bagi masyarakat itu sendiri. Dan salah satu peran LPM Kelurahan Lembang Bosang dengan upaya pemberdayaan masyarakat adalah dalam Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat. Peran LPM Kelurahan Lembang Bosang dalam menumbuh kembangkan, penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang dengan turut melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri. Dapat dilihat kegiatan yang dilakukan LPM tidak begitu banyak, kegiatan lebih didominasi pada kegiatan gotong royong dan kegiatan keamanan. Dalam melaksanakan kegiatannya LPM Kelurahan Lembang Bosang dapat berkerja sama dengan pemerintah ataupun lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Lembang Bosang. Sementara adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran atau kepekaan masyarakat terhadap lingkungannya dan cenderung menunggu untuk di gerakan. Dalam hal ini adapun tokoh masyarakat, mengatakan bahwa:

“Suatu pengetahuan berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan tugas yang telah dibebankan, dapat dilihat dari tingkat pendidikan karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik cara berpikir dalam menangani suatu tugas dan tanggung jawabnya dalam lembaga begitupun sebaliknya” (Hasil Wawancara 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas dapat dilihat dari tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, jika tingkat pendidikan tinggi maka semakin baik cara berpikir dalam menangani suatu tugas dan tanggung jawabnya.

Pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam lembaga dapat dilihat dari pendidikan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam berfikir, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kemampuan intelektualnya akan semakin meningkat pula sehingga karyawan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam lembaga tersebut. Efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan itu. Suatu pekerjaan dapat disebut efisien apabila mencapai hasil yang maksimum dengan usaha tertentu yang dilakukan. Atau apabila mencapai suatu tingkat hasil tertentu dengan usaha terkecil yang mungkin diberikan. Sebuah perusahaan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang juga baik. Kebenaraan tersebut bisa terlupakan oleh kita, akibat banyaknya perhatian yang kita berikan kepada komputer, alat-alat perkantoran otomatis, mesin-mesin, teori-teori baru mengenai manajemen perkantoran, analisa sistematis, dan dekorasi perkantoran. Begitu juga dengan efisiensi pekerjaan dan asas-asas yang terdapat didalamnya, hal ini juga sangat penting untuk pelaksanaan aktivitas seseorang dalam meningkatkan mutu lembaga. Efisiensi kerja diatas jelas

menyimpulkan bahwa sebuah lembaga dapat mengalami kemajuan dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan mampu menangani sebuah lembaga dengan menggunakan cara yang efisien. Dalam hal ini, adapun tanggapan informan yang berinisial Seksi pemberdayaan, mengatakan:

“iya, efisiensi dalam melaksanakan terutama dalam pemberdayaan masyarakat memang harus ada, dan juga dalam meningkatkan efisiensi petugas harus dilihat dari tingkat pendidikannya karena akan menambah pengetahuan tentang efisiensi dalam bekerja” (Hasil wawancara 15 Mei 2019).

Adapun salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Peningkatan efisiensi petugas perlu pengetahuan yang tinggi, agar menjalankan tugas ataupun pelaksanaan pemberdayaan harus ditingkatkan lagi, maka dengan ini akan berjalan sesuai yang telah diharapkan” (Hasil wawancara 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas mengatakan bahwa Peningkatan efisiensi petugas perlu pengetahuan yang tinggi, agar menjalankan tugas ataupun pelaksanaan pemberdayaan harus ditingkatkan lagi, maka dengan ini akan berjalan sesuai yang telah diharapkan.

Menurut penjelasan diatas bahwa penerapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar informasi mengatakan bahwa pengetahuan dalam sebuah lembaga dilihat dari strategi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran baru terlihat apabila kebijaksanaan dan strategi itu dilaksanakan dengan baik. Jika keputusan telah diambil, manfaat keputusan itu baru terasa setelah dilaksanakan. Jika rencana dan program kerja telah diurus pelaksanaanlah yang bisa membuktikan apakah rencana dan program kerja itu

realistis atau tidak, dalam arti mempermudah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga untuk menjadi seorang aparatur yang berkemampuan tinggi paling tidak harus memiliki tarap pendidikan yang tinggi pula, sebab pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran yang paling dasar terhadap kemampuan seseorang. Disamping itu juga harus mempunyai pengalaman yang luas dan terlatih untuk bidang pekerjaannya. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Lembang Bosang cukup bervariasi, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efisiensi dalam lembaga dapat dilihat dari pendidikan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam berfikir, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kemampuan intelektualnya akan semakin meningkat pula sehingga karyawan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efisiensi dalam lembaga tersebut.

4. Kemampuan Menerima Informasi

Pentingnya kreativitas dalam strategi karyawan untuk menerima daya serap menerima informasi dengan baik. Kemampuan dalam menerima informasi yang tersedia perlu kita mulai dengan menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi yang didapat.

Berpikir kritis adalah berpikir rasional tentang sesuatu, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu tersebut yang meliputi metode-metode pemeriksaan atau penalaran yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan. Seseorang yang berpikir kritis

memiliki ciri-ciri yaitu mampu berpikir secara rasional dalam menyikapi suatu permasalahan, mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah, dapat melakukan analisis, mengorganisasi, dan menggali informasi berdasarkan fakta yang ada, mampu menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah dan dapat menyusun argumen dengan benar dan sistematis.

Berpikir kritis untuk menemukan kesimpulan dan keputusan yang informatif, bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena keputusan dan kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis berbagai pendapat, asumsi, serta ide yang beragam dan bermacam-macam. Perbedaan ide atau gagasan tersebut akan membuat Anda berpikir kritis yaitu untuk menemukan kejelasan, persamaan, maupun perbedaan dari masing-masing kumpulan semua ide tersebut. Kemampuan berpikir kritis membuat Anda menganalisa kembali, mengidentifikasi, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengembangkan kembali semua ide dan segala asumsi hingga pada akhirnya kemudian akan memunculkan satu keputusan atau sebuah kesimpulan yang dianggap paling baik serta dapat dilakukan.

Banyak jenis pekerjaan yang menuntut Anda untuk berpikir kritis, bahkan hampir mayoritas pekerjaan mengharuskan Anda untuk berpikir kritis, baik itu usaha atau bisnis Anda sendiri maupun perusahaan-perusahaan tempat Anda bekerja. Berpikir kritis diperlukan dalam bekerja karena di dalam pekerjaan, Anda akan lebih sering dihadapkan pada kondisi dan keadaan dimana Anda harus mengambil keputusan atau kesimpulan, menganalisis bermacam-macam ide dan gagasan, mengevaluasi setiap pendapat yang muncul dari setiap orang yang berbeda, dan lain

sebagainya. Maka dari itu, Anda harus membiasakan diri untuk berpikir kritis dimanapun dan dalam situasi kapanpun. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda harus menggunakannya untuk mengambil keputusan yang harus segera diambil atau mendadak dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu.

Pendukung Media Komunikasi, Informasi, Sosialisasi Antara Pemerintah Kelurahan Dan Masyarakat

Dalam fungsi ini LPMK dikatakan sebagai pendukung, artinya LPMK hanya menjadi mediator dan fasilitator antara pemerintah dan masyarakat, seperti halnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, pembangunan, atau pun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Ataupun yang perantara dari masyarakat kepada pemerintah dalam penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang dilakukan oleh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan.

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan

pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM Kelurahan Lembang Bosang mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat. Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembangunan kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Lembang Bosang dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LPM sebagai fasilitator di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM di Kelurahan Lembang Bosang memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Lembang Bosang.

Berdasarkan pada hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan perannya sebagai pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, LPM Kelurahan Lembang Bosang sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, dapat dilihat dengan keterbukaan LPM terhadap masyarakat yang ingin mengakses informasi. Namun kemudian LPM Kelurahan Lembang Bosang mengalami kendala berupa tidak begitu terbukanya pemerintah dengan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan sehingga kemudian kegiatan yang dilakukan tersebut tidak efektif, karena pemerintah hanya melakukan koordinasi tetapi tanpa melakukan konsultasi kepada LPM Kelurahan Lembang Bosang. Dalam hal ini, adapun tanggapan informan Ketua LPMK, mengatakan:

“Sejauh ini penyebaran informasi di kelurahan ini belum maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian, karena setiap kali terbentuknya kebijakan baru entah itu dari hasil musyawarah staf lurah atau kebijakan langsung dari kecamatan tidak pernah langsung bisa terealisasi bahkan kadang banyak masyarakat tidak menerapkan samasekali. Salah satu faktor utama adalah masyarakat butuh waktu yang lama untuk sekedar mengetahui ataupun memahami kebijakan tersebut sehingga bisa disimpulkan bahwa penyebaran informasinya butuh waktu yang sangat lama dan tidak merata” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu masyarakat juga mengatakan:

“Penyebaran informasinya belum maksimal karena terkadang sering sekali masyarakat mengeluh ketika mengurus sesuatu di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat namun ternyata peraturannya sudah berubah, sehingga masyarakat biasa bingung” (Hasil Wawancara 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas bahwa penerapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar informasi mengatakan bahwa penyebaran informasi di

kelurahan ini belum maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian, karena setiap kali terbentuknya kebijakan baru entah itu dari hasil musyawarah staf lurah atau kebijakan langsung dari kecamatan tidak pernah langsung bisa terealisasi bahkan kadang banyak masyarakat tidak menerapkan sama sekali. Salah satu faktor utama adalah masyarakat butuh waktu yang lama untuk sekedar mengetahui ataupun memahami kebijakan tersebut sehingga bisa disimpulkan bahwa penyebaran informasinya butuh waktu yang sangat lama dan tidak merata sehingga masyarakat sering sekali mengeluh terhadap peraturan yang diterapkan dalam lembaga tersebut.

5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kepulauan Selayar

Setiap organisasi ataupun instansi pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Seperti halnya di kelurahan lembang bosang kecamatan bontomanai kepulauan selayar yang memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam kapabilitas pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat yang dimaksud ialah kendala dalam kapabilitas pemberdayaan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung adalah segala sesuatu yang sifatnya mendukung kapabilitas pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat

Kapabilitas pemberdayaan masyarakat di kelurahan lembang bosang kecamatan bontomanai kepulauan selayar tentu saja ada faktor pendukung yang dapat

membantu dalam kegiatan pemberdayaan. Faktor pendukung dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Motivasi

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara motivasi dari dalam ialah motivasinya muncul dari inisiatif diri kita.

Pada dasarnya motivasi itu hanya dua, yaitu untuk meraih kenikmatan atau menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa menjadi motivasi kenikmatan maupun motivasi menghindari rasa sakit. Jika kita memikirkan uang supaya kita tidak hidup sengsara, maka disini alasan seseorang mencari uang untuk menghindari rasa sakit. Sebaliknya ada orang yang mengejar uang karena ingin menikmati hidup, maka uang sebagai alasan seseorang untuk meraih kenikmatan.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha yang sedikit banyak memerlukan pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Suatu kebijakan sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rinci, karena ia tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat

jangka pendek akan tetapi juga akan digunakan untuk menanggulangi masalah dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk jangka waktu yang relatif panjang. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam praktek pemerintahan kebijakan dapat dibedakan ke dalam kebijakan internal, yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijakan eksternal yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun kebijakan hendaknya; a) Berpedoman pada kebijakan yang ada. b) Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang ada. c) Berorientasi kepada masa depan. d) Berorientasi kepada kepentingan umum. e) Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

Namun demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijakan sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijakan tertulis dapat berbentuk peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti pidato, surat edaran.

Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh Organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kebijakan Pembangunan

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang ada di Kelurahan yang tertib, lancar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kemitraan kebersamaan dengan Lembaga-lembaga, masyarakat serta mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
4. Menggali potensi-potensi ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6. Meningkatkan ketertiban masyarakat.

Arah Pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMK

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program-program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan yang akan dicapai. Kebijakan umum disesuaikan dengan visi dan misi serta berlandaskan pada hasil-hasil pembangunan dan mempertimbangkan kondisi, potensi permasalahan maupun tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk:

- a. Menetapkan secara teliti tentang program yang akan dilaksanakan.
- b. Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.

- c. Menciptakan kondisi-kondisi setiap pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh dukungan agar dapat mengimplementasikan keputusan.

Arah kebijakan pembangunan di Kelurahan Lembang Bosang sebagai berikut:

- a. Tercapainya penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan yang tertib dan lancar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tercapainya kemitraan, kebersamaan serta kerjasama yang baik dengan Lembaga-lembaga, masyarakat serta pihak pihak lain.
- c. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat.
- e. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat.
- f. Tercapainya peningkatan ketertiban masyarakat.

Tema dan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMK Tahunan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mempunyai berbagai kegiatan, Hampir semua bidang pembangunan LPMK berperan baik dan pertimbangan atau APBD sendiri LPMK pasti dilibatkan, berikut dijabarkan prioritas dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Lembang Bosang, seperti:

1. Tahun 2011

Tema: Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Prioritas:

- a. Optimalisasi pembangunan pertanian dalam arti luas
- b. Pengembangan usaha mikro dan industri kecil
- c. Peningkatan aksesibilitas dan
- d. Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- e. Pelestarian lingkungan hidup.
- f. Pembangunan yang ada di Kelurahan
- g. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
- h. Penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang ada di Kelurahan

2. Tahun 2012

Tema: Pengembangan Usaha Masyarakat Dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Prioritas:

- a. Pengembangan industri kecil.
- b. Pengembangan usaha mikro dan industri kecil
- c. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam didukung pelestarian lingkungan.
- d. Pengembangan pelayanan dasar murah.
- e. Peningkatan pembangunan infrastruktur
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Tahun 2013

Tema: Peningkatan Industri, Usaha Masyarakat Dan Kualitas Pelayanan Dasar Serta Pengembangan Investasi Industri.

Prioritas:

- a. Peningkatan industri kecil
- b. Peningkatan usaha mikro dan investasi industri.
- c. Pengembangan fasilitas investasi industri.
- d. Peningkatan pelayanan dasar murah
- e. Pemeliharaan dan peningkatan pembangunan infrastruktur
- f. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik.

4. Tahun 2014

Tema: Penguatan Industri, Usaha Masyarakat Dan Pelayanan Dasar Serta Peningkatan Fasilitas Investasi Industri.

Prioritas:

- a. Penguatan industri kecil.
- b. Penguatan usaha mikro dan industri kecil.
- c. Peningkatan fasilitas investasi industri.
- d. Penguatan kualitas pelayanan dasar murah.
- e. Peningkatan sistem informasi dan kelembagaan pelayanan publik.

5. Tahun 2015

Tema: Pemantapan Usaha Masyarakat Dan Pelayanan Dasar Serta Penguatan Fasilitas Investasi Industri Dan Pariwisata.

Proritas:

- a. Pemantapan industri kecil.
- b. Pemantapan usaha mikro dan industri kecil.
- c. Penguatan fasilitas investasi industri.
- d. Pemantapan kualitas pelayanan dasar murah.
- e. Penguatan sistem informasi dan kelembagaan pelayanan publik.

Berdasarkan faktor pendukung diatas, adapun informan Sekretaris LPM mengatakan bahwa:

“Motivasi sangat mendukung dalam pemberdayaan karena memberikan dorongan dalam melaksanakan dalam hal pembangunan kelurahan dan juga kebijaksanaan pemerintah menjadi faktor utama demi kelancaran pelaksanaan pemberdayaan” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Hal senada dikatakan oleh informan oleh salah satu masyarakat bahwa:

“Menyangkut dengan faktor pendukung dalam pemberdayaan, memang motivasi aparat maupun masyarakat sangat membantu dalam kelancaran kegiatan dalam pemberdayaan, adapun kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan dalam pelaksanaan pemberdayaan ini” (Hasil Wawancara 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari segi motivasi mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat sangat mendukung dengan memberikan dorongan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan begitupun dalam kebijaksanaan pemerintah dapat mengatur dan mengembangkan dalam pelaksanaan.

b. Faktor Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Munandar (2011) faktor penghambat dalam kapabilitas pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Anggaran

Dengan semakin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada perusahaan, maka ruang lingkup dan tugas yang dipikul oleh manajemen semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alata bantu yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian adalah anggaran.

Secara sederhana anggaran didefenisikan sebagai rencana keuangan yaitu suatu rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran mutlak sekali diperlukan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Mengingat pentingnya anggaran bagi perusahaan, maka dalam penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan kepada perencanaan dan perhitungan yang matang serta melibatkan berbagai departemen tertentu.

Anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, dapat diterapkan terhadap berbagai macam bentuk badan usaha terutama pada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya tergantung kepada skala organisasi atau lembaga serta rumitnya masalah yang

dihadapi. Namun demikian teknik dan prosedur pelaksanaannya mempunyai banyak kesamaan karena dilandasi oleh teori yang sama.

Suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di Kelurahan sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.

Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan:

- a. Menciptakan kenyamanan.
- b. Menciptakan kepuasan.
- c. Mempercepat proses kerja.
- d. Memudahkan proses kerja.
- e. Meningkatkan produktivitas.
- f. Hasil lebih berkualitas.

Prasarana Dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Ada /tidak
Peralatan kantor: komputer, fax	Ada /tidak
Mesin tik	Ada /tidak
Kardek	Ada /tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	0 jenis
Jumlah meja dan kursi	0 unit
LKMD/LPM Atau Sebutan Lain	Ada
Memiliki kantor sendiri	Ada
Peralatan kantor ; komputer, fax	Ada
Mesin tik	Ada
Kardek	Ada
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	7
Jumlah meja dan kursi	2
Buku administrasi	5
Jumlah kegiatan	7 Jenis
PKK	
Gedung/kantor	Ada
Peralatan kantor/ATK/inventaris	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku adminstrasi PKK	Ada 5 Jenis
Kegiatan	Aktif
Jumlah kegiatan	Ada, 4 Jenis

Karang Taruna	
Kepengurusan	Ada
Buku adminstrasi	Ada
Jumlah kegiatan	6 Jenis
RT	
Kepengurusan	Ada
Buku adminstrasi	Ada, 5 Jenis
Jumlah kegiatan	Ada, 5 Jenis
RW	
Kepengurusan	Ada
Buku adminstrasi	Ada, 5 Jenis
Jumlah kegiatan	Ada, 5 Jenis
Lembaga Adat	
Memiliki kantor/gedung/menumpang	Tidak
Kepengurusan	Tidak
Buku adminstrasi	-
Jumlah kegiatan	-
BUMDES	
Memiliki kantor/gedung/menumpang	Tidak
Kepengurusan	Tidak
Buku adminstrasi	-
Jumlah kegiatan	-
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	

Memiliki kantor/gedung/menumpang	Tidak
Kepengurusan	Tidak
Buku adminstrasi	–
Jumlah kegiatan	–

Berdasarkan faktor penghambat diatas, adapun informan Sekretaris LPM mengatakan bahwa:

“Tentu saja faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan yaitu kurangnya anggaran dan juga kurangnya sarana dan prasarana akan memperlambat dalam kegiatan pemberdayaan” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Adapun yang dikatakan Lurah Lembang Bosang, bahwa:

“Kurangnya sarana dan prasarana, tentu saja kegiatan pemberdayaan akan lambat, apalagi kurangnya anggaran karena kegiatan pemberdayaan tentu saja menghabiskan banyak anggaran” (Hasil Wawancara 14 Mei 2019).

Dari wawancara diatas mengatakan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan yaitu kurangnya anggaran dan juga kurangnya sarana dan prasarana akan memperlambat dalam kegiatan pemberdayaan dan telah banyak menghabiskan banyak anggaran dalam pembangunan di kelurahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pada garis besar kesimpulan pada penelitian ini ialah:

1. Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari segi indikator yaitu keterampilan sudah dalam kategori cukup baik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan program LPMK dilihat dari peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Sedangkan, Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari indikator pengetahuan bisa dikategorikan sudah cukup baik sebagai seorang aparatur yang berkemampuan tinggi paling tidak harus memiliki taraf pendidikan yang tinggi pula, sebab pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran yang paling dasar terhadap kemampuan seseorang. Namun demikian, pada aspek indikator kemampuan menerima informasi dapat dikategorikan masih kurang baik karna setiap kali terbentuknya kebijakan baru entah itu dari hasil musyawarah staf lurah atau kebijakan langsung dari kecamatan tidak pernah langsung bisa terealisasi bahkan kadang banyak masyarakat tidak menerapkan sama sekali.

2. Faktor penghambat dalam penerapan Pemberdayaan Masyarakat ialah anggaran yaitu sebagai rencana keuangan yaitu suatu rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor pendukung ialah adanya motivasi yang diberikan. Serta kebijaksanaan pemerintah yang perlu pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana dalam jangka waktu tertentu.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang ditemui dilapangan mengenai penerapan Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, diantaranya:

1. Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari keterampilan dan pengetahuan perlu ditingkatkan lagi sehingga lembaga dapat menerima inovasi baru terhadap lembaga khususnya lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Perlu ditingkatkan sosialisasi karena mengingat bahwa pengurus LPMK tidak memiliki latar belakang yang sama baik dalam hal pendidikan, prinsip, dan perbedaan perspektif dalam memandang sebuah kebijakan.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman LPMK dan perangkat desa, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan

pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader LPMK agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. 2014. *Kapasitas perangkat desa di kabupaten kudu*. Badan penelitian dan pengembangan kemendagri. Jakarta: Jurnal Bina Praja
- Anwar W dan Haryadi. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. TKP3 KPK. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Jakarta
- Djanegara, S Moermahadi. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik dan Permasalahan*. Yogyakarta: Hak Cipta
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA
- Fisipol Unismuh Makassar. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Makassar.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press
- Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali
- Martomo, Edhi. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah*. Universitas Gadjah Mada: Jurnal Ketahanan Nasional
- M. Annas, 2014. *Pemberdayaan Musyawarah di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten No 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.*
- Sandhi, Hargita. 2015. *Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Desa*. Universitas Negeri Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Derah*. Jakarta: SUN

Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabet

Yusuf, Muri. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

Yohannes Yahya, 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu



Tabel 2.4
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang/Kurang
1	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Rp. 85.767.000	Rp. 74.018.200	1. Terselenggaranya sosialisasi mengenai standar operasional pelayanan oleh Kecamatan Bontomanai kepada masyarakat; 2. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasana bidang pelayanan, berupa pencantuman Visi dan Misi kecamatan, motto juang kecamatan, rincian kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan dan lain sebagainya; 3. Terselenggaranya kegiatan penghitungan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan kelurahan dan warga penerima pelayanan.	Menunjang
2	Non Urusan	-	Rp. 4.734.555.500	Rp. 4.113.904.974	-	Menunjang

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
1	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Rp	Rp. 57.527.500,-	Rp. 47.128.125,-	1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang ekonomi; 2. Pemutakhiran data bidang ekonomi.	Menunjang
		Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 500.500.000,-	Rp. 699.454.300,-	1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang masyarakat; 2. Pemutakhiran data bidang masyarakat; 3. Pembinaan serta fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat (PKK, LPM dan Karang Taruna) baik tingkat kecamatan maupun kelurahan	Kurang
		Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 1.542.390.380,-	Rp. 3.760.560.347,-	1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup; 2. Pemutakhiran data bidang pembangunan dan lingkungan hidup;	Kurang

					3. Penyediaan sarana kebersihan dan petugas kebersihan serta petugas gorong-gorong yang tersebar di kecamatan maupun di masing masing kelurahan	
		Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 44.850.000,-	Rp. 33.850.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang keamanan dan ketertiban; 2. Pemutakhiran data keamanan dan ketertiban; 3. Tertatanya lokasi PKL di Kecamatan Sukasari 	
		Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 860.400.000,-	Rp. 717.900.450,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang pemerintahan umum; 2. Pemutakhiran data bidang pemerintahan umum; 3. Pembinaan terhadap pengurus RT dan RW 	Menunjang
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Rp. 85.767.000,-	Rp. 74.018.200,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang pelayanan; 2. Pemutakhiran data pelayanan 	Menunjang
2	Inovasi	Fasilitasi	Rp. -	Rp. -	-	-

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Pemberdayaan Lingkup RW				
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	Rp.	-	Rp.	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Rp.	-	Rp.	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Rp.	-	Rp.	-



Tabel 2.6
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 7.000.000,-	Rp. 8.312.125,-	• Tersusunnya dokumen pelaporan	Kurang
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp. 5.796.000,-	Rp. 6.000.000,-	• Tersusunnya dokumen laporan keuangan semeseran	Kurang
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 3.600.000,-	Rp. 4.474.500,-	• Tersusunnya dokumen pelaporan	Menunjang
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 4.050.000,-	Rp. 4.500.000,-	• Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Kurang
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Rp. 20.000.000,-	Rp. 10.677.100,-	• Tersusunnya Renstra dan Renja	Menunjang

MATRIKS PERBAIKAN UJIAN HASIL

No	Nama Penguji	Saran/Perbaikan	Hal	Hasil Perbaikan	Hal
1	Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapi data dari tingkat pendidikan, pengalaman, dan pelatihan yang diikuti 2. Faktor pendukung harus didukung dari data penelitian lapangan (Hasil Wawancara dan data sekunder) 	<p>Bab IV</p> <p>Bab IV</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi data dari tingkat pendidikan, pengalaman, dan pelatihan yang diikuti 2. Membenahi Faktor pendukung harus didukung dari data penelitian lapangan (Hasil Wawancara dan data sekunder) 	<p>Bab IV Hal. 67-70</p> <p>Bab IV Hal. 77-81</p>
2	Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan hasil wawancara setiap indikator 2. Kemukakan data sekunder untuk mendukung setiap indikator 3. Tambahkan kesimpulan dan saran dan diperbaiki 	<p>Bab IV</p> <p>Bab IV</p> <p>Bab V</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan hasil wawancara setiap indikator 2. Mengemukakan dan menjelaskan data sekunder untuk mendukung setiap indikator 3. Menambahkan kesimpulan dan saran dan diperbaiki 	<p>Bab IV Hal. 51-88</p> <p>Bab IV Hal. 67-76</p> <p>Bab V Hal. 89-90</p>
3	Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki hasil penelitian dengan sumber data primer dan data sekunder 2. Perbaiki kesimpulan harus mengarah permasalahan yang diteliti 3. Tambahkan analisa, data wawancara yang mendalam dari informan 	<p>Bab IV</p> <p>Bab V</p> <p>Bab IV</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membenahi hasil penelitian dengan sumber data primer dan data sekunder 2. Membenahi kesimpulan harus mengarah permasalahan yang diteliti 3. Menambahkan analisa, data wawancara yang mendalam dari informan 	<p>Bab IV Hal. 49-87</p> <p>Bab V Hal. 88-89</p> <p>Bab IV Hal. 49-87</p>

MATRIKS PERBAIKAN UJIAN HASIL

4	Dr. H. Muhammadiyah, MM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki teknik penulisan 2. Tambahkan data sekunder (Laporan kegiatan LPM) 3. Tambahkan referensi buku penelitian pada daftar pustaka 	<p align="center">Bab I-V</p> <p align="center">Bab IV</p> <p align="center">Daftar Pustaka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki teknik penulisan 2. Menambahkan data sekunder (Laporan kegiatan LPM) 3. Menambahkan referensi buku penelitian pada daftar pustaka 	<p align="center">Bab I-V Hal. 1-89</p> <p align="center">Bab IV Hal. 58-64</p> <p align="center">Daftar Pustaka Hal. 90</p>

mor : 0915/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
mp. : 1 (satu) Eksampul
il : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari
Stambuk : 105610485914
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.
Judul Skripsi : *"Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumulahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 08 April 2019

Dekan,
Uj. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 22447
Benteng Selayar

Benteng, 26 April 2019

Kepada

: 070/35/Keshangpol/IV/2019

Yth. Camat Bontomatene

: -

di

: Pemohonan Izin Penelitian

Tempat

Mendasari Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar Lembaga Penelitian Penguibangan dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 1062/05/4-VIII/III/1440/2019 tanggal 08 April 2019, perihal permohonan izin penelitian, Disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **PUTRI WULANDARI**
Nomor Stambuk : 105610485914
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Lembang Bosan
No. Tlp : 085343659454

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Instansi Saudara, dalam rangka penusunan Skripsi dengan judul "Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar" Yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 13 April s/d 13 Juni 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Kepulauan Selayar cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "LAPORAN" kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian disampaikan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK.**

INI L. RAHMAT, S.Pd, S.H, M.H

Pangkat Pembina, IV/a

NIP. 19630515 198703 1 022

1 disampaikan kepada :
bersangkutan.

RIWAYAT HIDUP



PUTRI WULANDARI. Dilahirkan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tepatnya Di Rumah Sakit Umum Selayar Kecamatan Bontomanai Pada Tanggal 1 Januari 1996. Anak kedua Dari Pasangan Baso Daeng Dan Siti Syamsiah. Penulis Awal Mengenal Pendidikan Di Taman Kanak - Kanak (TK) Ar-Royan Lembang Bosang Pada Tahun 2002. Peneliti Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN Gantarang Keke Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tahun 2008. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Di Pondok Pesantren Babussalam Dan Tamat Pada Tahun 2011. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMKN 1 Benteng Kecamatan Benteng Kepulauan Selayar Pada Tahun 2011 Dan Selesai Pada Tahun 2014. Pada Tahun Yang Sama Pula Penulis Melanjutkan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya Di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dan Penulis Menyelesaikan Kuliah Strata Satu (S1) Pada Tahun 2019.

